
PENDIDIKAN POLITIK WARGA DAN PENGUATAN DEMOKRASI DALAM KEPEMIMPINAN JOKOWI-AHOK

Reuben Reynold Sihite

Universitas Satyagama Jakarta
e-mail: gudangruben@yahoo.co.id

Abstract : *This article discusses the political communication performed by Jokowi and Ahok as Governor and Vice Governor of Jakarta to its citizens. Jokowi and Ahok implicitly or indirectly with a consistent run of political education for the citizens of Jakarta. The way is by providing answers or reasons for the policies they run against their critics. This paper linking the concept of political communication, political education, and democracy. This study found that political communication between the Governor and Deputy Governor of the citizens actually contain political messages that are educating citizens to be more respect for differences, respect for competence rather than ethnicity / race, and also respect the law. The paper begins by various measures Jokowi and Ahok as Governor and Deputy Governor and the criticism against them, the answers they give to their critics, a description of the concept of political communication, political education, and democracy, as well as analysis and conclusions.*

Keywords: *media culture, ekonomi politic, TV*

Abstrak, Artikel ini membahas komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terhadap warganya. Jokowi dan Ahok secara implisit atau tidak langsung telah dengan konsisten menjalankan pendidikan politik bagi warga DKI Jakarta. Cara tersebut adalah dengan cara memberikan jawaban-jawaban ataupun alasan-alasan terhadap berbagai kebijakan yang mereka jalankan terhadap para pengkritik mereka. Makalah ini mengaitkan konsep komunikasi politik, pendidikan politik, dan demokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi politik antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan warganya sebenarnya mengandung pesan-pesan politik yang bersifat mendidik warganya menjadi lebih menghargai perbedaan, menghargai kompetensi daripada kesukuan/ ras, dan juga menghormati hukum. Makalah ini dimulai dengan berbagai langkah Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur beserta kritik-kritik terhadap mereka, jawaban-jawaban yang mereka berikan terhadap para pengkritik mereka, uraian mengenai konsep komunikasi politik, pendidikan politik, dan demokrasi, serta analisis dan kesimpulan.

Kata kunci: komunikasi politik, pendidikan politik, demokrasi

PENDAHULUAN

Komunikasi politik yang dilakukan oleh Pasangan Jokowi-Ahok dengan berbagai kalangan masyarakat merupakan suatu upaya pendidikan politik bagi berbagai kalangan, terutama warga kota Jakarta, kaum birokrat Jakarta, dan kalangan elit politik Jakarta. Dua gaya

komunikasi yang berbeda antara Jokowi dan Ahok tidak menjadikan dua pemimpin tersebut berseberangan dalam nilai-nilai demokratis yang mereka anut. Nilai-nilai demokratis yang mereka anut adalah seperti patuh terhadap peraturan dan hukum, menghargai perbedaan sosial individu, serta menghargai profesionalitas dalam menilai individu.

Pendidikan politik/ kewarganegaraan tersebut secara konsisten disuarakan mereka bahkan sejak mereka kampanye. Model kampanye yang mereka lakukan adalah kampanye lewat pendidikan politik, diskusi, atau sekedar ketawa-ketiwi bersama warga (Nugroho, 2012). Jokowi rajin mendatangi forum diskusi yang membuka ruang masyarakat untuk melontarkan aspirasi, berdialog langsung dengan warga guna mengetahui permasalahan yang dihadapi warga. Kemudian, dihadapan warga, Jokowi menawarkan “obat mujarab” untuk menyembuhkan persoalan masyarakat. Lewat forum diskusi dia memaparkan program serta menampilkan misi dan visi partai politiknya secara lebih maksimal kepada warga sehingga bisa lebih memengaruhi warga dalam menentukan pilihan politik.

Kampanye dengan melakukan kunjungan *door-to-door* ke rumah warga memang agak melelahkan. Namun dengan cara itulah rakyat lebih mengetahui apa yang akan diperjuangkan Jokowi jika kelak menjadi pemimpin (Nugroho, 2012). Dalam suatu pengambilan keputusan pemasaran, pemahaman yang jelas atas apa yang menjadi keinginan dan bagaimana pelanggan memutuskan apa yang akan dibelinya merupakan informasi penting yang dibutuhkan. Dalam ilmu pemasaran, pelanggan atau consumer mempunyai gagasan tentang apa yang diinginkan oleh mereka. *Consumer decision making* atau pengambilan keputusan pelanggan merupakan proses yang dilakukan oleh pelanggan dalam melakukan suatu pengambilan keputusan untuk memilih, membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa (Wijayawati dan Lindy, 2006). Jokowi telah mampu menangkap dengan baik keinginan para calon warganya untuk kemudian memasarkan gagasan-gagasan untuk memenuhi keinginan calon warganya itu.

Pendidikan politik Jokowi dan Ahok ini tidak dilakukan dengan memasang iklan di berbagai media massa

namun dengan berbagai komentar dan tindakan mereka. Tindakan juga merupakan suatu komunikasi. Berbagai komentar dan tindakan mereka berdua yang mengandung pendidikan politik/ kewarganegaraan bisa ditemukan dalam berbagai kiprah mereka dalam menangani program-program kerja mereka.

Makalah ini akan menyoroti pendidikan politik Jokowi dan Ahok dalam dua program, yaitu relokasi warga yang menduduki bantaran Waduk Pluit (Jakarta Utara) ke rumah susun dan pengelolaan protes warga Lenteng Agung (Jakarta Selatan) terhadap penempatan lurah Susan Jasmine Zulkifli di wilayah mereka. Dua gebrakan/ program Jokowi-Ahok ini dipilih karena pada dua gebrakan ini bisa dianggap mewakili bagaimana mereka secara tidak langsung mendidik masyarakat dalam hal berdemokrasi, taat hukum, sadar hukum, dan lebih menghargai profesionalitas individu daripada atribut subyektif seseorang.

KAJIAN TEORI

Sistem Politik, Dalam mendiskusikan kiprah Jokowi dan Ahok dalam interaksinya dengan warga DKI Jakarta dan juga para elit politik Jakarta, selain konsep atau istilah komunikasi politik, konsep-konsep lain yang dipakai dalam rangkaian analisis ini adalah *sistem politik, pendidikan politik, demokrasi, dan demokratisasi*.

Apa yang dilakukan Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menjalankan salah satu fungsi sistem politik, yaitu komunikasi politik. Apa yang disampaikan mereka berdua tidak sekedar berkomunikasi mengenai berbagai kebijakan kota DKI Jakarta namun juga mengandung pendidikan politik/ kewarganegaraan bagi warga dan juga para elit DKI Jakarta. Bahkan apa yang diucapkan Jokowi dan Ahok ini secara tidak langsung merupakan pendidikan politik/ kewarganegaraan bagi

seluruh warga negara Indonesia dalam konsolidasi demokrasi.

Menurut Miriam Budiardjo, politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo, 2010). Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa berpolitik berarti melakukan kegiatan untuk memengaruhi penentuan berbagai peraturan yang akan mengikat sebagian atau seluruh masyarakat.

Dalam penelitian ini, politik diberi arti yang lebih luas daripada arti yang secara umum dipahami masyarakat, yaitu politik sebagai perjuangan untuk kekuasaan (*struggle for power*). Dengan mengikuti pendapat Miriam Budiardjo, politik diberi tempat sebagai sesuatu yang mempunyai makna 'positif'/'baik'/'agung' dikarenakan dilekatkan dengan tujuan bernegara yang umumnya berdasarkan idealism tertentu, dibandingkan pemahaman politik yang berdasarkan sudut pandang kekuasaan.

Dalam berpolitik, dibutuhkan sarana utama yaitu komunikasi politik (Saffer, 2013; Karlsson, 2013), komunikasi politik (*political communication*), secara sederhana, bisa diartikan sebagai segala bentuk pertukaran simbol atau pesan yang sampai pada tingkatan tertentu dipengaruhi atau memengaruhi berfungsinya sistem politik (Arifin, 2011).

Sistem politik (*political system*) sendiri bisa diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai unit yang saling berinteraksi yang berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan penjabatan sumber daya dengan tujuan akhir pembuatan keputusan. Dengan demikian, tiap pengiriman pesan yang berkaitan dengan kebijakan yang keluar dari sistem

politik maupun pengiriman pesan yang berkaitan dengan perilaku aktor-aktor politik bisa digolongkan kedalam wilayah komunikasi politik (Sihite, 2011).

Sistem politik yang dipilih bangsa Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal tersebut membawa konsekuensi bagi bangsa Indonesia, yaitu berpolitik dalam kerangka aturan main demokrasi. Menurut George Sorensen, demokrasi bisa dipilah menjadi dua yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara agak komprehensif (Sorensen, 2003). Mengutip pendapat Joseph Schumpeter, demokrasi secara sempit dimaknai sebagai sebuah metode politik, sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Sedangkan secara agak komprehensif, demokrasi mencakup tidak saja politik, tetapi juga mencakup hak-hak sosial dan hak-hak politik.

Dalam demokrasi konstitusional/ *Rechtsstaat/ Rule of Law* pada era Negara Hukum Klasik, ada empat unsur *Rechtsstaat*, yaitu hak-hak manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan (Budiardjo, 2011).

Sedangkan *Rule of Law* yang berkembang pada abad ke-20 sebagaimana dinyatakan oleh International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965, memasukkan unsur Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*).

Georg Sorensen mendefinisikan demokrasi politik sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi berikut (Sorensen, 2011): *pertama*, kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan; *kedua*, tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan; *ketiga*, tingkat kebebasan politik dan sipil-kebebasan berpendapat,

kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi -cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Kondisi-kondisi di atas adalah sebuah ideal demokrasi sebagai ideologi politik yang masih memerlukan kriteria-kriteria praktik politik. Eep Saefullah Fatah mengajukan empat kriteria pokok praktik politik demokrasi (Fatah, 1994). Keempat kriteria operasional itulah yang dijadikan ukuran minimal bagi praktik demokrasi. *Pertama*, partisipasi politik yang luas dan otonom. Pembatasan partisipasi adalah sebuah praktik antidemokrasi. Praktik politik demokrasi juga mensyaratkan adanya partisipasi politik yang luas, dalam arti tidak ada pembatasan dan eksklusivitas dalam penentuan sumber-sumber rekrutmen politik dan tidak ada pula eksklusivitas dalam formulasi kebijakan-kebijakan politik. *Kedua*, sirkulasi kepemimpinan politik secara efektif dan kompetitif. *Ketiga*, kontrol terhadap kekuasaan yang efektif. *Keempat*, kompetisi politik yang leluasa dan sehat dalam suasana kebebasan. Dalam kerangka ini, perbenturan kepentingan dan nilai politik dimungkinkan terjadi sejauh tidak menjadikan kehancuran bagi sistem politik. Suasana yang melingkupi kompetisi ini adalah suasana yang penuh kebebasan dan saling penghargaan, sehingga kompetisi --dalam istilah Lewis Cosser -- menjadi sebuah "*konflik yang fungsional positif*".

Demokratisasi bisa kita definisikan sebagai proses perubahan dari bentuk pemerintahan otoriter menuju bentuk pemerintahan demokrasi. George Sorensen mengemukakan tiga tahapan dalam demokratisasi (Sorensen, 2011). *Pertama*, tahapan persiapan (*preparatory phase*) yaitu pecahnya rezim nondemokratis. *Kedua*, tahapan keputusan yaitu mulai membangun tata tertib demokrasi. *Ketiga*, tahapan konsolidasi, yaitu demokrasi lembaga dan praktek demokrasi telah mendarah daging dalam budaya politik.

Tahapan konsolidasi ini merupakan suatu tahap dimana demokrasi telah mencapai titik yang solid.

Menurut Juan Linz, *demokrasi yang solid* adalah demokrasi di mana tidak satu pun aktor politik besar, partai, atau kumpulan kepentingan, kekuatan atau lembaga, yang memikikan bahwa ada alternatif lain di luar proses demokrasi untuk meraih kekuasaan, dan tidak ada lembaga politik atau kelompok yang berhak memveto tindakan para pembuat keputusan yang terpilih secara demokratis. Ringkasnya, demokrasi harus dilihat sebagai "satu-satunya permainan di kota" (Sorensen, 2011).

Untuk mencapai ideal tahapan konsolidasi demokrasi ini, maka diperlukan kesamaan persepsi antara masyarakat/ rakyat dan aparatur negara mengenai nilai-nilai demokrasi (Sihite, 2013). Penyamaan persepsi ini merupakan suatu keharusan karena bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang sangat majemuk. Nilai-nilai demokratis (*democratic values*) harus dijiwai dengan baik oleh rakyat dan aparatur agar masyarakat menilai dan merasakan bahwa demokrasi layak diperjuangkan.

Pendidikan Politik, Menurut Ramlan Surbakti pendidikan politik berkaitan dengan sosialisasi politik yang dapat dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik (Surbakti, 1999: 117).

Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negara. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik

para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Pada dasarnya pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan--aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Graham (2013) memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yaitu "pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada".

Berdasarkan pendapat di atas, pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang -dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya Alfian (1981:235) yang mengatakan bahwa:

"pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka rnemahami dan menghayati betul

nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun".

Dapat dipahami bahwa tujuan utama pendidikan politik adalah (1) setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. (2) setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik

Martin (2008) mengartikan pendidikan politik sebagai "upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya."

Berdasarkan pendapat Rusadi Kartaprawira tersebut, maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah.

Merujuk pada semua pengertian pendidikan politik yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, pada akhirnya telah membawa penulis sampai pada kesimpulan yang menyeluruh. Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anugota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, hal-hal dan norma--norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Kiprah Jokowi-Ahok dan Berbagai Resistensi, Sejak hari pertama dilantik sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur, Joko "Jokowi" Widodo dan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama

menjalankan roda pemerintahan kota Jakarta dengan kecepatan penuh (Jakartapost, 2014). Berbagai gebrakan pasangan Jokowi-Ahok dalam mengelola kota Jakarta yang diinisiasi oleh pasangan ini dikawal secara teratur dan dievaluasi pelaksanaannya.

Beberapa kebijakan Jokowi-Ahok dalam menata kota Jakarta adalah seperti membersihkan Pasar Tanah Abang (Jakarta) dari para pedagang kaki lima (PKL), mengeruk Waduk Pluit dan membuat taman di sekitar waduk, menata birokrasi (lelang jabatan camat dan lurah), meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP), merealisasikan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), pemangkasan dan transparansi anggaran pemda DKI Jakarta, perbaikan dan pengelolaan rumah susun Marunda, mengunggah rapat yang dipimpin Ahok ke media sosial You Tube untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah DKI Jakarta, dan promosi pulau-pulau di wilayah Jakarta sebagai tempat wisata.

Dari berbagai gebrakan mereka, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada dua gebrakan, yaitu relokasi warga yang menduduki bantaran Waduk Pluit (Jakarta Utara) ke rumah susun dan pengelolaan protes warga Lenteng Agung (Jakarta Selatan) terhadap penempatan lurah Susan Jasmine Zulkifli di wilayah mereka. Dua gebrakan/ program Jokowi-Ahok ini dipilih karena pada dua gebrakan ini bisa dianggap mewakili bagaimana mereka secara tidak langsung mendidik masyarakat dalam hal berdemokrasi, taat hukum, sadar hukum, dan lebih menghargai profesionalitas individu daripada atribut subyektif seseorang.

Ketika menata kawasan Waduk Pluit, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak habis pikir dengan tuntutan ganti rugi miliaran rupiah yang diminta oleh warga atas pembongkaran bangunan di Taman Burung Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Ali (38), warga setempat, meminta ganti rugi atas biaya yang ia keluarkan untuk

membangun 10 rumah permanen senilai Rp 4 miliar (kompas.com, 2013).

Pengusaha pelelangan ikan itu berharap Pemprov DKI memberikan ganti rugi minimal separuh dari biaya yang ia keluarkan. Tuntutan ganti rugi juga disampaikan oleh warga lain, tetapi tidak sampai menyebut nominal. Jokowi tidak berubah pendirian soal penegakan hukum kepada warga yang menyerobot tanah milik negara selama bertahun-tahun itu. Menurut dia, warga yang tinggal di sana bukan warga yang patuh hukum, melainkan penyerobot lahan negara. Jokowi menilai warga telah memetak tanah negara dan menyewakannya kepada warga lain. Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan apa yang dilakukan aparat semata-mata menegakkan aturan. "Kota ada aturannya, kalau waduk dipakai untuk rumah tidak boleh, sudah saya berikan garis, pasti itu," tegas Jokowi (ahok.org).

Sementara Ahok mengatakan, "Itu konyol *aja*. Kalau begitu, besok saya bangun rumah di depan Balaikota, mumpung saya Wagub. Nanti kalau saya sudah enggak di sini (Balaikota), saya minta ganti Rp 10 miliar, lumayan buat pensiun." (kompas.com).

Ketika menangani persoalan penolakan warga terhadap Lurah baru hasil lelang jabatan yaitu Susan Jasmine Zulkifli, Jokowi dan Ahok sama-sama mempertahankan Lurah baru tersebut. Sebagian warga Lenteng Agung menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Alasannya karena berbeda keyakinan dengan mayoritas warga yang dianutnya. Susan yang mengikuti lelang jabatan camat dan lurah beberapa waktu lalu terpilih menjadi Lurah Lenteng Agung sesuai dengan surat keputusan pengangkatan. Selain itu, warga juga menentang Lurah Susan dengan alasan karena Lurah Susan tidak mengibarkan bendera di kantor lurah pada tanggal 17 Agustus lalu. Namun hal itu telah dibantah oleh staf kelurahan Lenteng Agung, Debby. "Setiap hari selalu pasang

bendera merah putih. Walaupun, ada aksi ataupun tidak kami tetap pasang,” kata Debby, seorang staf kelurahan Lenteng Agung (merdeka.com).

Seperti diketahui, 415 lurah dan camat tersebut merupakan hasil dari seleksi dan promosi terbuka atau yang populer disebut lelang jabatan(kompas.com). Seusai menjalani bermacam-macam tes mulai dari manajerial dan tes pengetahuan, mereka dilantik pada 27 Juni 2013 lalu. Lurah dan camat tersebut terdiri dari 78 orang eselon III dan 337 orang eselon IV. Adapun pejabat yang dilantik sebagai camat atau lurah di luar pejabat definitif sebanyak 17 dan sisanya adalah pejabat definitif atau lurah dan camat yang lama.

Menurut Jokowi, kasus Lurah Susan bisa menjadi contoh pluralisme di Jakarta. “Seperti masalah Lurah Susan ini masalah apa yang mau kita cari? Lurah kan yang bisa melayani masyarakat, masalah kemampuan dan kompetensi bukan masalah lainnya,” jawab Jokowi (merdeka.com). “Diprotes masalah agama, ini tidak sekali akan minta lagi, kalau (Lurah Susan) dipecat bisa merembet ke seluruh Tanah Air. Saya sampaikan tidak (memecat). Kemajemukan kebhinekaan itu anugerah yang tidak boleh kita pertentangkan,” kata Jokowi saat menerima penghargaan sebagai tokoh Pluralis 2014 dari Lembaga Pemilihan Indonesia di Jakarta, Senin (30/12).

“Pluralisme dan kebhinekaan kita sudah final,” kata Jokowi saat menjadi pembicara di seminar ‘Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang’ di Aula FK UI, Jakarta, Sabtu (30/11) (merdeka.com). “Ini sudah berdasarkan sebuah lelang terbuka dan promosi terbuka. Tidak bisa diatur dengan cara demo dan desakan-desakan,” tegas Jokowi.

Sementara itu Jokowi dan Ahok juga berani menentang Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengusulkan penggantian Lurah Susan. “Pak Gubernur tidak salah menempatkan itu, tidak ada undang-undang yang melanggar. Tapi akan

lebih bijak lagi, kalau Susan ditempatkan yang di daerah non-muslim juga. Artinya aspirasi masyarakat terpenuhi,” ujar Gamawan (merdeka.com). Ahok mengatakan bahwa Mendagri harus belajar konstitusi (merdeka.com) . “Dia harus belajar konstitusi. Menurut saya Mendagri itu perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila, bukan ditentukan oleh orang tolak atau tidak tolak,” tegasnya. Sebab jika empat juta penduduk Jakarta yang memilih Fauzi Bowo mendemo Jokowi-Ahok, Ahok mempertanyakan sikap Fauzi Bowo apakah akan mencopot Jokowi-Ahok.

Menanggapi Gamawan Fauzi, Jokowi juga mengatakan agar urusan agama tidak dibawa-bawa dalam masalah jabatan lurah Susan. Soal protes warga karena Susan berbeda agama dengan mayoritas warga tidak bisa dijadikan pertimbangan.”Jangan sampai urusan agama dibawa-bawa ke sana,” tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/9). “Itu kan dari lelang jabatan, ya kita ini kan urusan detail itu kan ada di dinas. Tapi kalau bahwa dia (Susan) lulus iya, artinya dia punya kemampuan,” tukas Jokowi

Ahok juga menambahkan jika pindahkan orang berdasarkan agama akan merusak Indonesia. “Jujur ya kami rasa itu sudah melalui proses seleksi terbuka kami gak pernah ikut campur karena tes ini Polri, psikolog di Polri lalu mereka yang tempatkan orang-orang itu sesuai karakteristiknya dan tentu di tes itu tidak mempersoalkan agama. Kalau dipersoalkan mayoritas dan minoritas berarti saya pun gak cocok jadi wagub, kalau seperti itu terjadi Indonesia di ambang perpecahan,” kata Ahok saat wawancara dengan merdeka.com, Kamis (26/9). “Datang beberapa orang ke sini, saya nggak kenal, dia bilang sama saya kamu jangan arogan saya kasih kamu waktu 1x24 jam untuk pindahin lurah Susan, saya tanya bapak KTP-nya mana, KTP Depok.” katanya. Ahok menambahkan, “Kita tidak boleh

menentukan nasib seseorang atau pegawai karena primordial dia, karena agama. Tidak ada di republik ini seperti itu. Kita harus dasarnya konstitusi,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/8). “Kita sudah pilih prinsip demokrasi untuk itu. Kalau mau terbuka ya lakukan sistem seperti ini,” terangnya.

METODE

Pada kajian ini digunakan tipe kajian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses analisis data deskriptif karena berakar pada latar belakang alamiah bersifat subjektif. kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model. Sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan mengeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan secara kualitatif (Suwandi, 2008).

Jenis data yang digunakan pada kajian ini adalah Data Sekunder yang diperoleh melalui sumber-sumber lain yang telah dikumpulkan berkaitan dengan kajian ini berupa dokumentasi-dokumentasi yang diambil dari berbagai buku literatur,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian. Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan henegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik, harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia.

Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik.

Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik.

Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah: (1) peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit social dan kedurjanaan. (2) di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politif yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

Dalam perspektif demokrasi, televisi seharusnya menjadi salah satu media yang menjadi penyangga, karena media dapat menyediakan informasi politik bagi sehingga bisa digunakan masyarakat

dalam menentukan pilihan politiknya. Media ini juga dapat memetakan berbagai permasalahan dalam masyarakat dan berfungsi sebagai medium yang menciptakan keteraturan. Fungsi sebagai pengawan yang terus menerus bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika masyarakat yang sedang dalam proses demokrasi .

Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak dibarengi dengan usaha yang nyata di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan politik akan erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di masyarakat nantinya. Oleh karena itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini.

Dari berbagai jawaban yang dikemukakan oleh Jokowi dan Ahok dalam merespon berbagai masalah dan kritikan, terdapat konsistensi sikap mereka berdua dalam hal prinsip-prinsip pengelolaan negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah pengelolaan negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*) yang menjadi dasar dari sistem demokrasi suatu negara. Ketaatan terhadap hukum dan berbagai peraturan menjamin bahwa setiap individu mendapatkan haknya dan harus melaksanakan kewajibannya sebagai individu sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

Mengikuti pendapat Georg Sorensen di halaman sebelumnya bahwa demokrasi politik sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menjamin kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan, Jokowi dan Ahok telah menerapkan salah satu syarat dalam berdemokrasi, yaitu kompetisi yang luas dan meniadakan penggunaan kekerasan. Kompetisi untuk memperebutkan jabatan camat dan lurah tidak hanya terbatas di kalangan kantor

kelurahan setempat namun juga menjadi persaingan terbuka lintas kelurahan dan kecamatan yang didasarkan semata pada hasil tes atau ujian kemampuan individu tersebut. Lelang jabatan merupakan suatu terobosan untuk mendapatkan pelayan-pelayan masyarakat yang mempunyai kemampuan kerja yang baik.

Setahun berjalan, pemerintahan Jokowi-Ahok hampir tak satupun membuat kebijakan yang benar-benar baru. Pemerintahan ini lebih memutuskan untuk melakukan kebijakan-kebijakan klasik. Seperti misal, mengatasi banjir, mengurai kemacetan, memberi jaminan kesehatan, membangun rumah susun, menjamin pendidikan dasar, melancarkan birokrasi dan lainnya. Dalam mengatasi banjir, pemerintahan yang satu ini memang unik. Dalam banjir yang menenggelamkan ibu kota Indonesia, 18 Januari 2013 lalu, tak tanggung-tanggung, Gubernur itu turun langsung sebagai komando. Amukan air pada waktu itu menjebol tanggul di kawasan Latuharhary. Jokowi memimpin langsung dalam menanggulangi. Dengan kemeja putih dan celana hitam, dia tak ragu menerobos barisan lumpur menghampar. Dia menghabiskan siang-malam menunggu perbaikan tanggul tersebut.

Terkiat dengan kasus kemacetan Jakarta, pemilihan kebijakan dalam hal ini sangat klasik. Tidak ada yang baru. Jokowi memutuskan untuk menambah armada angkutan publik, semisal armada Trans-Jakarta. Selain itu, guna mencegah arus kendaraan pribadi masuk ke Jakarta, dia juga menambah bus angkutan dari luar jakarta ke kawasan ibu kota. Tak lama ini, untuk mengurangi kemacetan, juga telah diputuskan untuk melanjutkan proyek-proyek lama yang tertunda puluhan tahun silam, seperti pembangunan monorail yang sebenarnya *blueprint*-nya telah diselesaikan sekitar 24 tahun silam. Dalam hal kesehatan, kebijakan pemerintahan Jokowi melayani masyarakat juga tak menunjukkan hal baru.

Hasil dari berkali-kali blusukan,

akhirnya dia memutuskan untuk mengembalikan jaminan kesehatan ke model lama, Kartu Jakarta Sehat (KJS). Kartu ini direncanakan akan terbagi untuk 4,5 juta jiwa. Pada tahap awal, kartu ini telah dibagikan ke 3.000 jiwa di enam kelurahan kumuh di tengah kota. Dampaknya, para pemegang kartu ini dengan segera menghujani rumah sakit terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Dampaknya diterima langsung oleh rakyat. Meskipun begitu, para pemodal, penguasa rumah sakit mengeluh. Hasilnya, 16 rumah sakit keluar dari mekanisme KJS.

Dalam kasus rakyat yang menempati perkampungan kumuh, Jokowi memutuskan untuk meneruskan kebijakan lama, yaitu memindah masyarakat di perkampungan kumuh ke rumah susun. Program rumah susun ini pada awalnya telah digagas untuk mengantisipasi mahalnya lahan akibat perkembangan ibukota, dimulai tahun 1994. Namun lagi-lagi, program ini terbengkelai. Hingga, akhirnya, pemerintah Jokowi meneruskan program ini. Hasilnya pun jelas nyata. Ratusan kepala keluarga telah ramai-ramai menempati rumah baru mereka, rumah susun.

Bagi penerus bangsa, anak-anak, Jokowi pun tak mau meng-alpakan sisi ini. Pemerintahnya memutuskan untuk meneruskan kebijakan lama, jaminan pendidikan dasar. Upaya menjamin pendidikan dasar ini merupakan salah satu jaminan sosial tertua di negeri ini. Jaminan ini telah dimunculkan sejak negara ini didirikan, lihat UUD 45 dan jaminan pendidikan di sana. Memang, program ini sangat belum efektif. Jokowi datang untuk membuatnya bermakna. Jokowi menggelontorkan Kartu Jakarta Pintar untuk menjamin pendidikan anak-anak di Jakarta.

Hal yang menarik, pemerintahan Jokowi-Ahok menyingkap birokrasi semu di Jakarta. Lelang jabatan untuk pelayan masyarakat dilakukan. Program ini merupakan esensi dari semangat

demokrasi yang menjadi dasar berdirinya Republik kita. Namun, orang-orang jahat mengantongi ranah ini rapat-rapat. Pemerintahan Jokowi datang untuk membuka semangat terpendam dari demokrasi.

Kinerja Jokowi-Ahok menggambarkan apa yang mereka putuskan adalah sepele. Bukan membuat baru. Akan tetapi hanya melanjutkan pemikiran yang terbengkalai. Kebijakan dari program-program yang dilakukan merupakan buah pikir dari pemerintahan sebelumnya. Yang menarik untuk dicarikan jawaban kemudian, mengapa program-program lama itu menjadi bermakna di tangan Jokowi-Ahok? Untuk menjawab ini, langkah yang perlu dilakukan adalah membandingkan proses pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan Jokowi-Ahok

Penolakan Jokowi dan Ahok terhadap tekanan warga Lenteng Agung dan tekanan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi merupakan pesan yang sangat jelas bahwa pemerintahan Jokowi-Ahok dikelola berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan bukan berdasarkan hukum rimba. Jawaban-jawaban Jokowi dan Ahok terhadap tekanan-tekanan tersebut merupakan suatu pesan politik yang sangat jelas dari dalam sistem politik lokal DKI Jakarta terhadap lingkungannya bahwa dalam pengelolaan pemerintahan rezim demokratis, partisipasi politik yang luas dalam perekrutan dalam sistem politik harus dibuka seluas-luasnya bagi individu yang mampu tanpa ada pembatasan-pembatasan. Sebagaimana disebutkan oleh Eep Saefullah Fatah di halaman sebelumnya, pembatasan partisipasi adalah sebuah praktik antidemokrasi.

Ahok dan Jokowi mempunyai persepsi yang sama mengenai pluralisme di Jakarta dan bagaimana menangani pluralisme tersebut. Keduanya memberikan pesan politik yang jelas dalam bentuk sikap dan tindakan ketika mempertahankan penempatan Lurah Susan di Lenteng Agung. Keduanya konsisten

dengan aturan main yang telah mereka tetapkan mengenai syarat profesionalisme dalam jabatan publik seperti lurah dan camat. Ketika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, pemimpin dan masyarakat harus konsisten melaksanakan aturan main tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Ahok dan Jokowi dalam penempatan Lurah Susan yang beragama Kristen di Lenteng Agung yang penduduknya beragama Islam.

Keteguhan Ahok dan Jokowi memberikan pesan politik yang jelas --baik kepada masyarakat maupun kepada para elit politik bahwa keterbukaan dalam proses perekrutan jabatan publik merupakan salah satu pilar demokrasi untuk menjaga sistem demokrasi tersebut berjalan optimal. Keluaran (*output*) positif sebuah sistem ke lingkungannya akan kembali lagi kepada sistem tersebut sebagai sebuah masukan (*input*) yang positif. Yang dimaksud dengan sistem di sini adalah pemerintahan DKI Jakarta beserta jajarannya. Dan pesan politik yang jernih/ jelas dalam komunikasi politik yang terjadi antara sistem dan lingkungannya --yaitu antara pemerintah DKI Jakarta dan warga Jakarta-- akan semakin menguatkan budaya demokrasi yang telah muncul di masyarakat Jakarta.

Sikap dan tindakan Jokowi dan Ahok dalam hal penempatan Lurah Susan merupakan suatu pendidikan politik yang gamblang dari pemimpin birokrasi. Pendidikan politik yang diberikan kepada khalayak luas itu adalah dalam hal menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak individu terhadap jabatan profesional tertentu yang didasarkan pada kemampuan pribadi dan bukan karena faktor-faktor subyektif seperti suku, ras, maupun agama. Pendidikan politik tersebut merupakan salah satu unsur atau pilar dalam rule of law yang berguna dalam merawat perkembangan demokrasi. Dengan melakukan pendidikan politik tersebut, Jokowi dan Ahok secara langsung telah ikut menyumbang bagi tahap akhir dari proses demokratisasi yang sedang

berlangsung di Indonesia, yaitu tahap konsolidasi demokrasi yang ditandai dengan mengakarnya nilai-nilai demokrasi di tengah-tengah masyarakat dan elit suatu bangsa.

Sementara itu sikap dan tindakan Jokowi dan Ahok dalam merelokasi warga Waduk Pluit ke rumah susun memberikan pesan politik bahwa tiap warga negara harus mematuhi peraturan yang berlaku di suatu negara. Ribuan warga Waduk Pluit disadarkan bahwa tindakan mereka menduduki lahan di sekitar waduk adalah melanggar peraturan daerah (perda) dan juga melanggar undang-undang. Mereka disadarkan bahwa menduduki tanah negara dan memanfaatkan tanah tersebut merupakan tindakan ilegal dan harus ditindak secara hukum.

Dengan keberhasilan Jokowi dan Ahok merelokasi ribuan penduduk tersebut secara tidak langsung menegakkan HAM karena telah Jokowi dan Ahok telah menyediakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan tempat tinggal. Tindakan menempatkan warga bantaran waduk ke rumah susun bisa disebut sebagai tindakan memanusiakan manusia yang dengan demikian telah membantu menegakkan hak asasi manusia (HAM) para warga karena telah memberikan kepastian hukum bagi para warga sehingga para warga bisa menuntut hak-hak sosial dan politik mereka dengan lebih baik.

Tegaknya hak asasi manusia (HAM) dan meresapnya budaya politik demokratis ini merupakan persyaratan penting dalam proses konsolidasi demokrasi. Pada tahapan ini, masyarakat dan elit politik telah sepakat untuk taat pada aturan main dalam berpolitik, yaitu aturan main dalam melakukan kegiatan untuk memengaruhi penentuan berbagai peraturan yang akan mengikat sebagian atau seluruh masyarakat. Untuk semakin memperkuat budaya politik demokratis ini, media juga perlu terus didorong untuk mendukung demokrasi dengan tidak memberikan tempat/ ruang bagi kelompok-

kelompok sosial yang cenderung menggunakan kekerasan.

Pembahasan. Selama satu tahun kepemimpinannya yang jatuh pada 15 Oktober 2013, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menilai, kesadaran tertib sosial dan hukum sudah mulai tumbuh dalam diri warga Jakarta. Pertumbuhan kesadaran tertib sosial dan hukum tersebut, lanjutnya, terjadi karena adanya perubahan cara pendekatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI kepada warganya. Tak hanya itu, Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama juga berupaya keras memberikan contoh melakukan tindakan tertib hukum dan sosial dalam menjalankan tugasnya sehari-sehari sebagai pemimpin warga Jakarta. Jokowi mengatakan, “Kalau mau mengajak mereka, pasti mereka mau. Selama saya menjadi Gubernur saya kira kesadaran tertib sosial dan hukum warga sudah mulai tumbuh di Jakarta. Karena itu, saya harus memberikan contoh, seluruh jajaran Pemprov DKI jangan hanya memberikan kata-kata atau omongan doang, tapi harus ada contohnya”.

Dengan komunikasi politik yang baik antara pemimpin dan rakyat ditambah saling percaya antara birokrat dan warga, maka kondisi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat akan terbangun dengan sendirinya. Keberhasilan pengelolaan kota yang ditunjukkan duet Jokowi dan Ahok menjadi inspirasi bagi warga dan elit politik di berbagai kota lain di seluruh Indonesia dikarenakan Jakarta merupakan barometer sosial, politik, dan ekonomi bagi seluruh kawasan lain di Indonesia. Selain itu pula, keberhasilan pengelolaan berbagai kebijakan dalam negeri akan ikut menyumbang pada citra positif Indonesia di luar negeri.

Jokowi dan Ahok barangkali salah satu contoh bagi para partai politik untuk mulai meneliti kembali kebijaksanaan mereka dalam menunjuk wakil-wakil mereka yang akan duduk dalam pemerintahan.

Jokowi sebelum menjadi Walikota adalah seorang pelaku bisnis dan hampir

bisa dikatakan tidak pernah terjun di politik praktis. Pengalaman politiknya hampir tidak punya, demikian aku Jokowi. Demikian juga Ahok. Meski ia lebih punya dasar pengalaman politik dibanding Jokowi, namun punya pendekatan sama dengan Jokowi. Ahok adalah seorang pelaku bisnis sebelum terjun ke dunia politik. Keuntungan penunjukkan tenaga profesional yang suka terjun ke lapangan dan memihak rakyat dalam banyak hal akan menguntungkan masyarakat dan memperbaiki image partai politik yang bersangkutan.

Gaya kepemimpinan Jokowi dan Ahok adalah fenomena yang amat menarik terjadi di Indonesia saat ini. Jokowi dan Ahok lebih mengutamakan bagaimana memperbaiki ethos kerja dan manajemen system di lingkungan kerjanya dengan pendekatan praktis, humanis dan menyaring informasi langsung dari kalangan terbawah. Sebuah pendekatan yang membedakan dari pelaku-pelaku politik lain yang duduk dalam pemerintahan sebelumnya.

Sebuah pendekatan praktis di lapangan memang sering berlawanan dengan apa yang dianalisa secara teori yang kadang bertumpah tindh karena pendekatan multidisiplin yang digunakan. Pendekatan langsung di lapangan lebih memungkinkan untuk membuat sebuah keputusan dengan cepat dan masuk akal. Pendekatan langsung di lapangan juga sebagai jalan pintas dan terobosan atas kebijaksanaan yang berdasar ilmu multidisiplin yang dilematis dan kadang menemukan jalan buntu. Akhirnya tidak jarang terjadi pemaksaan pendekatan teori ke lapangan. Akibatnya hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan.

Pendekatan Jokowi dan Ahok yang langsung ke lapangan berkemungkinan besar untuk menampung segala permasalahan dari berbagai sudut sekaligus tanpa analisa teori yang muluk-muluk.

Jokowi saat menjabat Walikota Solo pernah bercerita dalam sebuah

wawancara yang dilakukan di TV tentang pemindahan penduduk di sekitar bantaran sungai di Solo. Jokowi mendatangi penduduk tersebut untuk berdialog langsung hingga 24 kali sebelum akhirnya penduduk di bantaran tersebut bersedia pindah. Jokowi amat anti dengan asal main gusur yang menurutnya tidak manusiawi, tidak mau kerja keras dan main gampang. Untuk kasus berikutnya, Jokowi hanya perlu mengadakan dialog cuma sebanyak tiga kali dengan penduduk dan mereka bersedia pindah ke lokasi baru.

Penduduk dari kalangan terpinggirkan tersebut kalau kita lihat dalam sejarah, sebenarnya amat mematuhi apa yang diperintahkan oleh atasannya asal saja atasan tersebut bisa merebut hati mereka. Kalau hati mereka telah terebut, pengorbanan mereka kadang tidak tanggung-tanggung. Lihat saja prestasi Presiden Soekarno, Jendral Soedirman, Mahatma Gandhi dan tokoh yang memihak rakyat lainnya. Mereka adalah contoh para pemimpin yang berhasil merebut hati rakyat. Jokowi dan Ahok sepertinya juga mencoba pendekatan ini. Tidak berusaha menguasai kepala rakyatnya tapi lebih menukik ke manusianya dengan merebut hatinya.

Keberhasilan dalam merebut hati rakyat itulah yang membuat karier Jokowi dan Ahok sukses. Jokowi dan Ahok tidak perlu keluar banyak uang dalam kampanye politiknya. Hati rakyat yang telah terebut akan memberi dukungan kepercayaan tanpa ragu-ragu. Jokowi sendiri sempat mengakui bahwa terpilihnya dia sebagai Walikota adalah sebuah kecelakaan. Karena modal yang dipakai hanyalah kepercayaan dari rakyat. Demikian juga kasusnya dengan Ahok. Dalam kampanye pemilihan Bupati Belitung dia hanya bermodal gantungan kunci dan nomer telpon hp pribadinya buat rakyat pendukungnya.

Fenomena inilah yang kurang disadari oleh pelaku-pelaku politik selama ini. Mereka menggunakan pendekatan

dengan menguasai kepala dengan iming-iming rasionil yang bisa dihitung atau kalau gagal bisa dengan ancaman. Politik uang, main sogok, main beli suara, menakut-nakuti, main kuasa, main gertak dan sebagainya adalah contoh akrab yang sering kita dengar. Sebuah metode yang digunakan sejak lama di Indonesia sejak jaman Belanda. Rakyat adalah kawula yang gampang ditakut-takuti supaya nurut perintah.

Maka tidak heran jika pendekatan Jokowi dan Ahok sering memancing kritik dari golongan orang-orang mapan yang terbiasa dengan cara kerja system feodal. Namun pendekatan Jokowi Ahok yang langsung dengan mengadakan dialog ke lapangan lebih efektif dalam menangkis kritik meski dari berbagai penjuru. Tudingan miring selalu bisa dimentahkan dengan bukti-bukti konkrit sederhana di lapangan. Cara berpikir praktis, sederhana dan faktuil.

Tidak heran pula para kalangan mapan tersebut akhirnya kehabisan peluru untuk mengkritik. Mereka merasa keteter dan kepepet. Maka kritik yang dilontarkan makin terkesan asbun, mengada-ada, tidak masuk akal dan tidak populer – terkesan bertujuan hanya untuk membela atau mendongkrak popularitas partai politiknya. Salah satunya contohnya adalah dengan mengangkat isu SARA atau tanpa menawarkan pilihan alternatif yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Mereka tidak sadar bahwa rakyat terutama yang hidup di perkotaan, kini makin kritis dan berangsur meninggalkan sistem dunia feodalisme.

Sebenarnya fenomena Jokowi Ahok ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kaum pelaku politik. Mereka harus mengoreksi pendekatan bias mereka dalam menentukan kandidat pemegang kekuasaan eksekutifnya. Untuk Indonesia saat ini perlu orang-orang yang punya kemampuan teknis dan mau kerja keras dengan terjun langsung ke lapangan daripada orang yang berpengalaman di bidang politik dan mendekati rakyat hanya dengan

kemampuan retorika. Kandidat yang dicintai rakyat dengan sendirinya akan menambah pamor partai politiknya. Sehingga suatu saat pendekatan politik uang bisa benar-benar ditinggalkan dalam usaha merebut jumlah pilihan suara rakyat

PENUTUP

Simpulan, Komunikasi politik yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok baik terhadap warga Jakarta maupun terhadap elit politik merupakan suatu pendidikan politik/ kewarganegaraan. Pesan-pesan yang dikandung dalam berbagai sikap dan tindakan Jokowi dan Ahok mengandung pembelajaran mengenai nilai-nilai demokrasi. Jokowi dan Ahok memberi pesan yang jelas bahwa warga harus menaati aturan-aturan dalam hidupnya sebagai warga kota. Selain itu Jokowi dan Ahok juga memberikan pendidikan kewarganegaraan secara konkrit mengenai penghargaan terhadap nilai-nilai profesionalisme dan menghargai keberagaman sosial di Indonesia. Terakhir, Jokowi dan Ahok menegaskan bahwa tiap warga negara atupun kelompok-kelompok dalam masyarakat harus mengikuti aturan main dalam bingkai sistem bernegara yang bangsa Indonesia anut, yaitu sistem demokrasi.

Komunikasi politik yang berhasil dijalankan dengan baik oleh Jokowi dan Ahok telah mendinamiskan sistem politik Jakarta. Sistem politik yang sebelum era mereka cenderung tertutup kini telah semakin dinamis dikarenakan pola komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan warga kota. Terbukanya sumbatan-sumbatan dalam komunikasi warga kota Jakarta-elit politik/ birokrat telah semakin memperkuat keyakinan dan dukungan terhadap budaya politik demokratis di benak warga Jakarta. Hal ini telah memberi harapan baru bagi proses konsolidasi demokrasi di Jakarta dan Indonesia pada umumnya.

Saran, Perlu dikembangkan suatu model yang mengarahkan pada

peningkatan pendidikan politik yang menempatkan public sebagai pihak yang dikuatkan, dicerdaskan dalam lingkup demokratis..

DAFTAR RUJUKAN

Almond, Gabriel. (1990) *Budaya Politik, Tingkah Laku, Demokrasi di Lima Negara* Jakarta: Bumi Aksara.

Arifin, Anwar (2011) *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Budiardjo, Miriam (2010) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Fatah, R. Eep Saefulloh (1994) *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia.

Graham, Missy and Elizabeth Johnson Avery. (2013) *Government Public Relations and Social Media : An Analysis of the Perceptions and Trends of Social Media Use at the Local Government Level*. *Public Relations Journal* (Vol 7 No 4 ISSN 1942-4604, 1-21).

Kartono, Kartini. (1990) *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.

Kamal, Miko. (2011) *Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance*. *Jurnal Manajemen Teknologi* (Volume 10 Number 2, 145-155)

Martin , Lanny W. (2008) *Coalition Government and Political Communication*. *Political Research Quartely* (Volume 61 Number 3, 502-516). from <http://prq.sagepub.com/content/15/1/18>

Nugroho, Bimo dan Ajianto Dwi Nugroho (2012) *Jokowi: Politik Tanpa Pencitraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Saffer,Adam J, Maureen Taylor and Aimei Yang. (2013) *Political Public Relations in Advocacy: Building Online Influence and Social Capital*. *Public*

Relations Journal (Vol 7 No 4 ISSN 1942-4604, 1-35).

Sihite, Reuben Reynold (2013b) *The Challenges of Violent Mass-Organizations towards a Nation-State: Indonesia Case*. Dalam Winner Agung Pribadi dan Achmad Zulfikar (eds.). *The End of The Westphalian Settlement?: Contemporary Global Challenges towards the Nation-State System*. Yogyakarta: Gemini Publishing.

Sihite, Reuben Reynold (2013a) *Dua Citra Indonesia yang Saling Bersaing di Luar Negeri: Strategi Komunikasi Internasional Indonesia*. In Heri Budianto, Leila Mona Ganiem, dan Dewi Sad Tanti (Eds.). *Identitas Indonesia dalam Televisi, Film, dan Musik*. Jakarta: Puskombis UMB & ASPIKOM.

Sihite, Reuben Reynold. 2012 *New Media and Political Communication (Indonesia Case)*. In Diah Wardhani and Afdal Makkuraga Putra (Eds.). *The Reposition of Communication in The Dynamic of Convergence*. Jakarta: Kencana.

Sihite, Reuben Reynold (2011) *Strategi Komunikasi Partai Politik Oposisi: Studi Kasus Website PDI-P*. Dalam Heri Budianto (ed.). *Media dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Puskombis UMB.

Sorensen, Georg (2003) *Demokrasi dan Demokratisasi* (terj.). Penerjemah: I. Made Krisna. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Surbakti, Ramlan. (1999) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wijayawati, Fanny dan Natalia Lindy Masui (2006) *Strategi Pemasaran Produk Tekiro Tools di Bengkel Tradisional Wilayah Jakarta (2006-2008): Studi Kasus Produk Tekiro Tools PT Altama Surya Arsa*. Tesis tidak diterbitkan. Program MM Wijayawiyata Manajemen Angkatan 53, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta.

<http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/16/jokowi-ahok-year-one-full->

[speed-bureaucracy.html](#) Diakses 1 Februari 2014.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/17/1919463/Jokowi.Pertanyakan.Tuntutan.Rp.2.Miliar.oleh.Warga.Taman.Burung.Pluit> Diakses 1 Februari 2014.

<http://ahok.org/berita/news/ini-jawaban-jokowi-soal-gugatan-warga/> Diakses 1 Februari 2014.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/17/1742216/Basuki.Ingin.Kerjain.Provokator.Warga.Taman.Burung.Pluit> Diakses 1 Februari 2014.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/warga-lenteng-cari-cari-kesalahan-lurah-susan-soal-bendera.html> Diakses 2 Februari 2014.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/09/1206399/Jokowi.Segera.Umumkan.Evaluasi.Lurah.dan.Camat> Diakses 2 Februari 2014.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-jika-lurah-susan-dipecat-bisa-merembet-seluruh-tanah-air.html> Diakses 2 Februari 2014.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-sebut-kasus-lurah-susan-bukti-pluralisme-di-jakarta-final.html> Diakses 2 Februari 2014.

<http://www.merdeka.com/jakarta/5-jawaban-jokowi-ahok-terhadap-mendagri-soal-lurah-susan.html> Diakses 3 Februari 2014.

<http://www.merdeka.com/jakarta/5-jawaban-jokowi-ahok-terhadap-mendagri-soal-lurah-susan/ahok-mendagri-harus-belajar-konstitusi.html> Diakses 3 Februari 2014.

<http://www.merdeka.com/jakarta/5-jawaban-jokowi-ahok-terhadap-mendagri-soal-lurah-susan/jokowi-jangan-urusan-agama-dibawa-bawa.html> Diakses 3 Februari 2014.

<http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-kalau-pindahkan-orang-berdasar-agama-rusak-negara-ini-wawancara-ahok-1.html> Diakses 5 Februari 2014.

<http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sebut-ayah-lurah-lenteng-agung-seorang-muslim.html> Diakses 1 Februari 2014. Diakses 5 Februari 2014.

[sudah-mulai-tumbuh-di-jakarta.html](http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sebut-ayah-lurah-lenteng-agung-seorang-muslim.html)
Diakses 5 Februari 2014.

<http://www.beritasatu.com/megapolitan/144282-jokowi-tertib-sosial-dan-hukum->